

Pengaruh Implementasi Aplikasi Sistem Keuangan Desa dan Transparansi terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Desa

Mahdiah Yusuf Hasliani ^{1✉} **Marwah Yusuf** ²

Program Pascasarjana STIEM Bongaya, Makassar, Indonesia

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menguji pengaruh implementasi aplikasi sistem keuangan desa dan transparansi terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Desa di Kecamatan Curio Kabupaten Enrekang. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif deskriptif dan melibatkan 11 desa yang ada di Kecamatan Curio, Kabupaten Enrekang. Pemilihan sampel menggunakan metode purposive sampling dengan kriteria, yaitu desa yang dijadikan sampel hanya 7 yang dikarenakan jarak antara kantor desa yang satu dengan yang lain sangat jauh dan memiliki akses jalan tidak terlalu baik. Kedua, responden adalah aparatur yang terlibat langsung dalam pengelolaan keuangan desa terdiri dari Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kaur Tata Usaha dan Umum, Kaur Perencanaan, Kaur Keuangan, serta Bendahara. Dengan demikian, jumlah keseluruhan responden adalah 42 orang. Pengumpulan data menggunakan metode kuesioner. Selanjutnya, dilakukan uji instrument (terdiri atas uji validitas dan uji reabilitas), uji asumsi klasik (terdiri atas uji normalitas, uji multikolonieritas, dan uji heteroskedastisitas), analisis data (analisis statistik deskriptif dan analisis statistik inferensial), dan uji hipotesis (uji parsial, uji koefisien determinasi, dan uji simultan). Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi aplikasi sistem keuangan desa dan transparansi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah desa.

Kata Kunci: *Implementasi Aplikasi Sistem Keuangan Desa, Kualitas Laporan Keuangan, Dan Transparansi.*

Abstract

This study aims to examine and examine the effect of implementing village financial system applications and transparency on the Quality of Village Government Financial Reports in Curio District, Enrekang Regency. This research is descriptive quantitative research and involves 11 villages in Curio District, Enrekang Regency. The sample selection used a purposive sampling method with the criteria. Only seven villages were sampled because the distance between one village office and another was very far, and road access was not too good. Second, respondents are apparatuses directly involved in village financial management: the Village Head, Village Secretary, Head of Administration and General Affairs, Head of Planning, Head of Finance, and Treasurer. Thus, the total number of respondents is 42 people. We were collecting data using a questionnaire method. Furthermore, the instrument test (consisting of validity and reliability test), classical assumption test (consisting of normality test, multicollinearity test, and heteroscedasticity test), data analysis (descriptive statistical analysis and inferential statistical analysis), and hypothesis testing (partial test, the coefficient of determination test, and the simultaneous test). The results showed that the implementation

of village financial system applications and transparency positively impacted the quality of village government financial reports.

Keywords: *Implementation of Village Financial System Applications, Quality of Financial Reports, and Transparency.*

Copyright (c) 2021 Mahdiah Yusuf

✉ Corresponding author :

Email Address : marwah.yusuf@stiem-bongaya.ac.id

PENDAHULUAN

Desa sebagai level pemerintahan terendah, memiliki hak untuk mengatur rumah tangganya sendiri tanpa meninggalkan adat istiadat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 1 tentang Desa menyebutkan bahwa Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Setiap kegiatan yang terkait Keuangan Desa merupakan kewajiban dari desa itu sendiri dalam proses perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa.

Dalam pelaksanaan pemerintah, desa diwajibkan mengelola keuangan desa secara transparan, akuntabel, efektif, dan partisipatif. Transparan berarti dikelola secara terbuka, akuntabel berarti dipertanggungjawabkan secara hukum, efektif berarti dikelola secara baik dan benar, dan partisipatif bermakna melibatkan masyarakat dalam prosesnya. Pemerintah desa wajib menyusun laporan pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja desa (APB) dan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APB desa. Laporan hasil pengelolaan keuangan desa berdasarkan Permendagri No. 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja masyarakat. Masyarakat menggunakan pengungkapan berbasis laporan untuk mengevaluasi hasil kinerja perangkat desa dan menjadi media untuk menunjukkan transparansi dan akuntabilitas semua informasi yang terkait dengan pengelolaan keuangan desa (Ramadhan, 2014 dalam Puspasari & Purnama, 2018). Selain itu, pemerintah harus mampu menyajikan laporan keuangan yang mengandung informasi keuangan yang berkualitas.

Namun sebaliknya, masih ada aparat desa yang memanipulasi laporan keuangan sehingga informasi yang diberikan juga tidak benar. Seperti yang terjadi pada tahun 2014, empat Kepala Desa di Kecamatan Curio, Kabupaten Enrekang dijatuhi hukuman masing-masing 1 tahun penjara karena secara sah melakukan tindak pidana korupsi. Mereka terbukti melanggar pasal 3 dan pasal 8 Undang-Undang pemberantasan Korupsi karena menyelewengkan dana bantuan dari pemerintah untuk pembangunan infrastruktur desa. Program bantuan tersebut senilai Rp 200.000.000.00 yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Sulawesi Selatan 2012. Dana tersebut dibagikan kepada empat desa, masing-masing Rp 50.000.000.00 untuk pembangunan jembatan dan drainase desa. Hanya, Terdakwa selaku pengelola anggaran tidak melaksanakan proyek tersebut. Para

terdakwa juga diketahui membuat laporan pertanggungjawaban fiktif seolah-olah proyek tersebut telah dikerjakan (koran tempo.com, 2014).

Sebagai upaya pencegahan terjadinya kembali kasus tersebut, BPKP telah memperkenalkan sebuah sistem informasi akuntansi khusus desa yang disebut dengan Sistem Keuangan Desa (siskeudes). Menurut Harjanti, (2019), pemerintah dalam mengembangkan aplikasi siskeudes adalah untuk membantu pemerintah desa lebih mandiri dalam mengelola keuangan desa secara efektif dan lebih baik. Melalui aplikasi ini desa memperoleh kemudahan dalam kesederhanaan dalam pengelolaan keuangan desa dan laporan-laporan yang sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku. Adanya aplikasi ini akan memudahkan para perangkat desa dalam membuat pelaporan dan pertanggung jawaban laporan keuangan desa secara cepat dan efisien (Rahmawati & Fajar, 2017 dalam Puspasari & Purnama, 2018). Rusmayanti, (2014) dalam Puspasari & Purnama, (2018) menambahkan bahwa sistem ini memiliki fitur untuk pendokumentasian terhadap realisasi anggaran, sebagai bukti bahwa anggaran tidak disalahgunakan.

Sebelum Siskeudes diluncurkan, sebagian besar desa membuat anggaran, pembukuan, dan laporan keuangan menggunakan Microsoft Excel atau aplikasi lain yang formatnya tidak standar. Hal ini menyulitkan pemerintah Kabupaten/Kota dalam mengevaluasi APBDes dan Laporan keuangan desa. Implikasi dari penggunaan aplikasi adalah dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 menginstruksikan agar seluruh badan publik menyediakan informasi publik yang dapat di akses oleh masyarakat secara umum kecuali informasi yang sifatnya rahasia. Konsep transparansi dalam laporan keuangan pemerintah daerah meyakini bahwa transparansi adalah prinsip untuk memastikan bahwa setiap orang dapat memperoleh atau secara bebas memperoleh informasi administrasi pemerintahan, yaitu informasi tentang proses kebijakan, perumusan, dan hasil pelaksanaan. Jika transparansi meningkat maka akan mempengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah desa (Rifandi, 2019).

Topik penelitian ini telah dikaji banyak peneliti, diantaranya Rifandi, (2019) yang menemukan bahwa kualitas laporan keuangan desa dipengaruhi oleh implementasi aplikasi sistem keuangan dana dan transparansi. Berbanding terbalik dengan penelitian yang dilakukan oleh Susanti, (2018) dan Ermino, (2017) yang masing-masing menemukan bahwa pemanfaatan teknologi dan transparansi tidak berpengaruh secara parsial terhadap kualitas laporan keuangan. Adanya perbedaan hasil penelitian tersebut, menimbulkan minat untuk melakukan replikasi penelitian. Adapun perbedaan pada penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah lakukan adalah lokasi penelitian dan variabel penelitian yang digunakan dalam penelitian tersebut. Berkenaan dengan hal tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menguji pengaruh implementasi aplikasi sistem keuangan desa dan transparansi terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Desa di Kecamatan Curio Kabupaten Enrekang.

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintah mendefinisikan laporan keuangan sebagai sebuah laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh entitas pelaporan. Laporan keuangan dibuat dan disusun untuk memberikan informasi keuangan yang relevan dan informasi terkait kegiatan ekonomi yang

dilakukan oleh entitas pelaporan. Menurut PSAK No. 1, tujuan laporan keuangan adalah memberikan informasi tentang posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas entitas yang bermanfaat bagi sebagian besar kalangan pengguna laporan dalam rangka membuat keputusan ekonomi. Berkenaan dengan hal tersebut, sangat penting bagi suatu entitas untuk menjaga kualitas dari laporan keuangannya.

Pentingnya kualitas dalam laporan keuangan ialah agar memudahkan para pemakai memahami informasi dari laporan keuangan tersebut. Laporan keuangan dibuat untuk mengambil keputusan, alat akuntabilitas publik, serta memberikan informasi yang diterapkan untuk mengevaluasi kinerja organisasi, maka dalam setiap membuat laporan keuangan harus memenuhi kriteria atau sesuai dengan aturan yang telah diterapkan supaya laporan keuangan memiliki kualitas yang baik, dapat dipercaya dan akurat. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintah menjelaskan karakteristik kualitatif laporan keuangan sebagai ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya. Kualitas laporan keuangan merupakan persyaratan normatif yang harus dipenuhi dalam penyusunan laporan keuangan agar laporan keuangan yang dihasilkan dapat memberikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna laporan keuangan tersebut.

Beberapa kualitas penting informasi yang terkandung di dalam laporan keuangan menurut Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang terkandung dalam Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010, yaitu pertama, relevansi (*relevance*). Relevan, yaitu informasi yang termuat di dalamnya dapat mempengaruhi keputusan pengguna dengan membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu atau masa kini dan memprediksi masa depan, serta mengoreksi hasil evaluasi mereka di masa lalu. Informasi yang relevan memiliki unsur-unsur, diantaranya manfaat umpan balik (*feedback value*), manfaat prediktif (*predictive value*), tepat waktu (*timeliness*), dan lengkap. Kedua, keterandalan (*reliable*). Andal, yaitu informasi dalam laporan keuangan bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material, menyajikan setiap fakta secara jujur, serta dapat diverifikasi. Informasi yang andal memenuhi karakteristik, ialah penyajian jujur, dapat diverifikasi (*verifiability*), dan netralitas. Ketiga, dapat diperbandingkan (*comparability*). Dapat dibandingkan, yaitu informasi yang termuat dalam laporan keuangan akan lebih berguna jika dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau laporan keuangan entitas pelaporan lain pada umumnya. Keempat, dapat dipahami (*understandability*). Dapat dipahami Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat dipahami oleh pengguna dan dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna.

Puspasari & Purnama, (2018) menyatakan bahwa terdapat dua kriteria utama yang dibutuhkan agar manajemen dapat memberikan pertanggungjawaban kegiatannya pada pengguna laporan keuangan. Pertama, relevan. Relevansi informasi keuangan merupakan informasi yang dihasilkan harus memenuhi unsur manfaat umpan balik (*feedback*), manfaat prediktif terkait keputusan dan konsekuensi apa saja yang bisa terjadi, serta ketepatan waktu. Kedua, andal. Keandalan berkaitan dengan informasi yang dalam penyajiannya jujur, dapat diverifikasi dan netral atau tidak mementingkan kepentingan tertentu. Menurut Mardiasmo, (2018), laporan keuangan yang relevan, handal dan dapat dipercaya dihasilkan dari sistem akuntansi yang handal. Sistem akuntansi yang lemah menyebabkan laporan keuangan yang dihasilkan juga kurang handal dan kurang

relevan untuk pembuatan keputusan. Kualitas laporan keuangan diukur dengan indikator yaitu relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami.

BPKP telah memperkenalkan sebuah sistem informasi keuangan yang dapat diimplementasikan oleh pemerintah daerah terkhusus desa. Sebuah aplikasi yang disebut dengan Siskeudes. Menurut BPKP, (2016), aplikasi sistem keuangan desa (siskeudes) merupakan aplikasi sederhana yang dikembangkan oleh badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) bersama Ditjen Bina Pemerintah Desa Kementerian Dalam Negeri dalam rangka meningkatkan kualitas tata kelola keuangan desa. Aplikasi Siskeudes mulai diterapkan ditahun 2015 dengan didukung oleh surat Menteri Dalam Negeri Nomor 143/8350/BPD tanggal 27 November 2015 perihal Aplikasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Surat KPK Nomor B.7508/01-16/08/2016 tanggal 31 Agustus 2016 tentang Himbauan terkait Pengelolaan Keuangan Desa/Dana Desa. Aplikasi Siskeudes mengacu pada pengaturan pengelolaan keuangan desa yang berlaku saat itu yaitu Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Menurut survey BPKD tahun 2014, pengetahuan SDM perangkat desa sangat minim dalam hal keuangan desa, padahal uang yang harus dikelola di desa sangat banyak. Siskeudes adalah aplikasi gratis yang dapat menjadi solusi. Tujuan dari diterapkannya aplikasi sistem keuangan desa adalah untuk memudahkan dalam pelaporan keuangan. Selain itu, juga untuk menata kelola keuangan secara optimal serta sebagai alat tolak ukur pengelolaan keuangan desa sehingga tidak keluar dari koridor peraturan undang-undang. Sehingga, apabila aplikasi sistem keuangan desa diterapkan dengan baik akan meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah desa.

BPKP, (2016) menetapkan beberapa indikator untuk menilai keberhasilan implementasi aplikasi sistem keuangan desa, yaitu pertama, sistem kualitas. Kualitas sistem adalah kualitas dari kombinasi hardware dan software dalam sistem informasi. Fokusnya adalah performa dari sistem yang merujuk pada seberapa baik kemampuan perangkat keras, perangkat lunak, kebijakan, dan prosedur dari sistem informasi dapat menyediakan informasi kebutuhan pengguna (DeLone & Lean, 1992). Kualitas sistem diukur menggunakan instrumen yang digunakan oleh Ifinedo, (2006) yang terdiri atas empat item pengukuran, yaitu sistem teknologi informasi memiliki data yang akurat, sistem teknologi informasi fleksibel, sistem teknologi informasi mudah digunakan, dan sistem teknologi informasi memiliki fitur yang baik.

Kedua, penggunaan. Konsep penggunaan dari suatu sistem informasi dapat dilihat dari beberapa perspektif, yakni penggunaan nyata dan penggunaan persepsian (Hartono, 2007). Perbedaan ini penting untuk membedakan antara penggunaan yang merupakan keharusan yang tidak dapat dihindari atau merupakan penggunaan secara sukarela. Penggunaan direplikasi dari penelitian Chin et al., (1988) yang terdiri dari dua item pengukuran, yaitu penggunaan harian dan frekuensi penggunaan. Ketiga, kepuasan penggunaan. Kepuasan pengguna merupakan respon dan umpan balik yang dimunculkan pengguna setelah memakai sistem. Sikap pengguna terhadap sistem informasi merupakan kriteria subjektif mengenai seberapa suka pengguna terhadap sistem yang digunakan. Kepuasan pemakai diukur menggunakan instrumen dalam penelitian Seddon & Yip, (1992) yang terdiri dari tiga item pengukuran, yaitu puas dengan efisiensi sistem; puas dengan efektifitas sistem; serta kepuasan menyeluruh terhadap sistem teknologi

informasi. Keempat, dampak individu. Dampak individu diartikan sebagai seberapa baik pegawai melakukan tugas/pekerjaan yang diberikan, termasuk didalamnya inisiatif yang dimiliki, kemampuan dalam memecahkan masalah, kuantitas dan kualitas pekerjaan, ketepatan cara penggunaan sumber daya yang ada dan menyangkut energi yang diperlukan dalam pekerjaan (Boshoff & Arnolds, 1995). Peningkatan kinerja diukur menggunakan instrumen penelitian Flippo, (1984) yang terdiri dari lima item pengukuran, yaitu pekerjaan dilakukan dengan teratur dan tertata rapi; pekerjaan dilakukan sesuai dengan prosedur; mampu mengakomodasi ide kepada atasan dan rekan kerja dalam mengerjakan tugas; merasa pekerjaan yang diterima merupakan tanggung jawab yang harus diselesaikan; serta membantu teman menyelesaikan pekerjaan untuk mencapai tujuan. Kelima, dampak organisasi. Dampak organisasi didefinisikan sebagai efek dari informasi terhadap kinerja organisasional (DeLone & Lean, 1992). Dampak organisasi diukur dengan instrumen pengukuran kesuksesan sistem informasi DeLone & Lean, (1992) yang terdiri dari tiga item pengukuran, yaitu pengurangan biaya operasional, peningkatan laba dan kualitas produk. Rifandi, (2019) telah mengkaji dan menemukan bahwa implementasi aplikasi keuangan desa berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah desa. Berkenaan dengan hal tersebut, hipotesis dirumuskan, sebagai berikut:

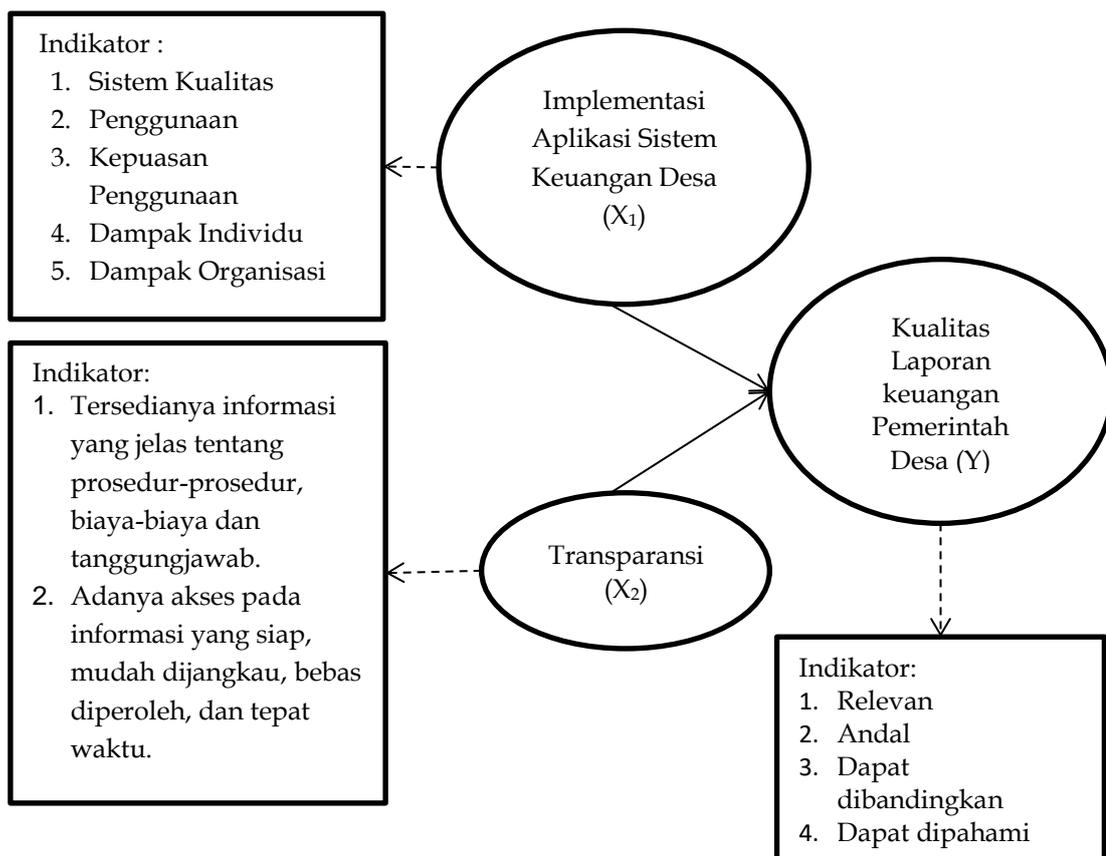
H1: Implementasi aplikasi sistem keuangan desa berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah desa

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 menginstruksikan agar seluruh badan publik menyediakan informasi publik yang dapat diakses oleh masyarakat secara umum kecuali informasi yang sifatnya rahasia (transparansi). Transparansi merupakan salah satu syarat penting untuk menciptakan tata pemerintahan yang baik. Melalui transparansi setiap kebijakan dan keputusan dalam organisasi, keadilan dapat dihasilkan dan pengungkapan kondisi aktual dapat didorong, sehingga setiap pemangku kepentingan dapat mengukur dan memprediksi segala sesuatu yang terkait dengan organisasi (Amalia, 2017 dalam Rifandi, 2019). Peraturan Pemerintah No 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah menyebutkan bahwa transparansi ialah prinsip keterbukaan dan kejujuran yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah atas pengelolaan sumber daya yang dipercayakan sesuai peraturan dalam bentuk penyusunan laporan keuangan daerah. Transparansi termasuk dalam asas penyajian jujur dalam prinsip laporan keuangan yang berkualitas dan andal. Apabila transparansi dijalankan dengan baik akan meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah desa. Indikator yang digunakan untuk mengukur transparansi menurut Bappenas, (2016), yaitu pertama, tersedianya informasi yang jelas tentang prosedur-prosedur, biaya-biaya dan tanggungjawab. Transparansi adalah prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintah, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasil-hasil yang dicapai. Menyediakan Informasi tentang biaya, target, dan ferformasi dari pelayanan publik, dan prosedur-prosedur untuk mengaduh dan mengeluh. Akses informasi berkaitan dengan ketersediaan suatu sistem dimana informasi menjadi tersedia bagi masyarakat dan pihak lainnya.

Kedua, adanya akses pada informasi yang siap, mudah dijangkau, bebas diperoleh, dan tepat waktu. Akses pada informasi yang akurat dan tepat waktu tentang kebijakan ekonomi dan pemerintah yang sangat penting bagi pengambilan keputusan ekonomi. Pemerintah harus mampu memberikan informasi siap dan mudah dijangkau oleh masyarakat. Keterbukaan informasi publik memberi hak kepada setiap orang untuk memperoleh informasi dengan mengakses data yang ada di badan publik, dan menegaskan bahwa setiap informasi publik itu harus bersifat terbuka bagi setiap pengguna informasi publik. Berkaitan dengan hal tersebut, Rifandi, (2019) dalam penelitiannya menemukan bahwa transparansi berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah desa. Dengan demikian, hipotesis dirumuskan sebagai berikut:

H2: Transparansi berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah desa.

Adapun keterkaitan antara implementasi aplikasi sistem keuangan desa, transparansi, dan kualitas laporan keuangan pemerintah desa digambarkan dalam skema berikut:



Gambar 1. Kerangka Konseptual

METODOLOGI

Penelitian ini berupa penelitian kuantitatif deskriptif yang dilaksanakan di Kecamatan Curia, Kabupaten Enrekang. Populasi pada penelitian ini adalah seluruh aparatur dari 11 Desa. Pemilihan sampel menggunakan metode purposive sampling dengan kriteria, yaitu pertama, desa yang dijadikan sampel hanya 7 yang dikarenakan jarak antara kantor desa yang satu dengan yang lain sangat jauh dan memiliki akses jalan tidak terlalu baik. Kedua, responden adalah aparatur yang terlibat langsung dalam pengelolaan keuangan desa berdasarkan Permendagri No 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, yang terdiri dari Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kaur Tata Usaha dan Umum, Kaur Perencanaan, Kaur Keuangan, serta Bendahara). Dengan demikian, jumlah keseluruhan responden adalah 42 orang. Adapun pengumpulan data dilakukan dengan menyebarkan kuesioner. Setelah data terkumpul, data diproses dengan menggunakan uji instrument (terdiri atas uji validitas dan uji reabilitas) dan uji asumsi klasik (terdiri atas uji normalitas, uji multikolonieritas, dan uji heteroskedastisitas). Selanjutnya, dilakukan analisis data (analisis statistik deskriptif dan analisis statistik inferensial) dan uji hipotesis (uji parsial, uji koefisien determinasi, dan uji simultan).

Tabel 1. Operasional Variabel dan Pengukuran

Variabel	Indikator	Skala
Implementasi aplikasi sistem keuangan desa (X ₁)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sistem Kualitas 2. Penggunaan 3. Kepuasan Penggunaan 4. Dampak Individu 5. Dampak Organisasi Sumber: BPKP, (2016)	Ordinal
Transparansi (X ₂)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tersedianya informasi yang jelas tentang prosedur-prosedur, biaya-biaya dan tanggungjawab. 2. Adanya akses pada informasi yang siap, mudah dijangkau, bebas diperoleh, dan tepat waktu. Sumber: Bappenas, (2012)	Ordinal
Kualitas laporan keuangan Pemerintah Desa (Y)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Relevan 2. Andal 3. Dapat dipahami 4. Dapat dibandingkan Sumber: PP No. 71 tahun 2010	Ordinal

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dari hasil penelitian, dikehui bahwa jumlah responden adalah sebanyak 42 responden. Hasil analisis statistik deskriptif dengan menggunakan SPSS sebagaimana tampilan table 2 menunjukkan bahwa implementasi aplikasi sistem keuangan desa (X₁) memiliki nilai minimum sebesar 53.00, nilai maximum sebesar 70.00, nilai mean sebesar 60.83 dan nilai standar deviasi sebesar 4,10. Sementara itu, Transparansi (X₂) memiliki nilai minimum sebesar 30.00, nilai maximum sebesar

40.00, nilai mean sebesar 34.95, dan nilai standar deviasi sebesar 2.52. Demikian juga dengan kualitas laporan keuangan pemerintah desa (Y) memiliki nilai minimum sebesar 34.00, nilai maximum sebesar 50.00, nilai mean sebesar 45.69, dan nilai standar deviasi sebesar 4.77. Data diatas menunjukkan penyebaran data instrument masing-masing variabel X dan Y adalah baik karena nilai mean yang lebih besar daripada standar deviasi.

Tabel 2. Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
X1	42	53.00	70.00	60.8333	4.10185
X2	42	30.00	40.00	34.9524	2.52743
Y	42	34.00	50.00	45.6905	4.77538
Valid N (listwise)	42				

Selanjutnya hasil analisis terkait uji validitas menunjukkan bahwa seluruh instrument implementasi aplikasi sistem keuangan dinyatakan valid karena rhitung lebih besar dari rtabel sehingga layak digunakan untuk mengukur gejala yang diteliti.

Tabel 3. Hasil Uji Validitas Implementasi Aplikasi Sistem Keuangan Desa

No. Butir Instrument	r_{hitung}	r_{tabel}	Keterangan
X1.1	0,652	0,30	Valid
X1.2	0,760	0,30	Valid
X1.3	0,523	0,30	Valid
X1.4	0,327	0,30	Valid
X1.5	0,506	0,30	Valid
X1.6	0,451	0,30	Valid
X1.7	0,692	0,30	Valid
X1.8	0,644	0,30	Valid
X1.9	0,619	0,30	Valid
X1.10	0,475	0,30	Valid
X1.11	0,714	0,30	Valid
X1.12	0,764	0,30	Valid
X1.13	0,569	0,30	Valid
X1.14	0,325	0,30	Valid
X2.1	0,654	0,30	Valid
X2.2	0,615	0,30	Valid
X2.3	0,711	0,30	Valid
X2.4	0,605	0,30	Valid
X2.5	0,675	0,30	Valid
X2.6	0,624	0,30	Valid
X2.7	0,762	0,30	Valid
X2.8	0,315	0,30	Valid
Y1	0,823	0,30	Valid
Y2	0,826	0,30	Valid
Y3	0,831	0,30	Valid
Y4	0,820	0,30	Valid
Y5	0,862	0,30	Valid
Y6	0,873	0,30	Valid
Y7	0,873	0,30	Valid
Y8	0,920	0,30	Valid
Y9	0,917	0,30	Valid

Y10	0,896	0,30	Valid
-----	-------	------	-------

Tabel 3 menunjukkan bahwa angka dari nilai Cronbach Alpha pada variabel independen (Implementasi aplikasi sistem keuangan desa dan transparansi) dan variabel dependen (kualitas laporan keuangan pemerintah desa) menunjukkan nilai di atas 0,60. Hal ini menunjukkan bahwa seluruh pernyataan untuk variabel independen dan dependen adalah reliabel dan dapat disimpulkan bahwa instrumen pernyataan kuesioner menunjukkan keandalan dalam mengukur variabel-variabel yang diteliti secara tepat.

Tabel 4. Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	Cronbach Alpha	Batas nilai Cronbach Alpha	Keterangan
Implementasi Aplikasi Sistem Keuangan Desa	0,840	0,60	Reliabel
Transparansi	0,764	0,60	Reliabel
Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Desa	0,959	0,60	Reliabel

Selanjutnya pada table 5, diketahui bahwa nilai Test statistic yang diperoleh yaitu 0,100 nilai tersebut lebih besar dari 0,05 dan Asymp. Sig yang diperoleh yaitu sebesar 0,200 nilai tersebut lebih besar dari 0,05. Sehingga dapat tersebut berdistribusi normal dan penelitian ini dapat dilanjutkan.

Tabel 5. Hasil Uji Normalitas
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

	Unstandardized Predicted Value
N	42
Normal Parameters,a,b	Mean 45.6904762 Std. Deviation 3.20867779
Most Extreme Differences	Absolute .100 Positive .095 Negative -.100
Test Statistic	.100
Asymp. Sig. (2-tailed)	.200c,d

Tabel 6. Hasil Uji Heteroskedastisitas

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	16.819	5.632		2.986	.005
X1	-.039	.107	-.066	.360	.721
X2	-.340	.174	-.360	-1.957	.058

Tabel 6 menunjukkan bahwa variabel independen yaitu implementasi aplikasi sistem keuangan desa (X1) memiliki nilai sig 0,721 > 0,05, transparansi (X2) memiliki nilai sig 0,058 > 0,05. Dengan demikian, semua variabel independen tidak terjadi heteroskedastisitas. Hasil studi ini juga menunjukkan bahwa disimpulkan bahwa data tersebut bebas dari multikolinearitas.

Tabel 7. Hasil Uji Regresi Linear Berganda

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients
	B	Std. Error	Beta
1 (Constant)	-5.664	9.102	
X1	.439	.173	.377
X2	.705	.281	.373

Source: Data diolah, 2021

Berdasarkan tabel 14, dapat dirumuskan suatu persamaan regresi untuk mengetahui pengaruh implementasi aplikasi sistem keuangan desa, dan transparansi terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah desa adalah sebagai berikut:

$$Y = -5.664 + 0.439x_1 + 0.705x_2 + e$$

Model ini menunjukkan bahwa koefisien regresi hasil taksiran bertanda positif. Hasil ini menggambarkan adanya hubungan yang positif antara variabel implementasi aplikasi sistem keuangan desa dan transparansi terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah desa, yang berarti bahwa semakin meningkatnya implementasi aplikasi sistem keuangan, transparansi maka akan meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah desa. Dapat dijelaskan bahwa variabel implementasi aplikasi sistem keuangan desa (X1) memiliki koefisien regresi positif sebesar 0,439 yang berarti apabila implementasi aplikasi sistem keuangan desa meningkat sebesar 1% maka kualitas laporan keuangan pemerintah desa akan mengalami peningkatan sebesar 0,439% pada saat variabel bebas lainnya tidak berubah (konstan). Sama halnya dengan variabel transparansi (X2) yang juga memiliki koefisien regresi positif sebesar 0,705 yang berarti apabila transparansi meningkat sebesar 1% maka kualitas laporan keuangan pemerintah desa akan mengalami peningkatan sebesar 0,705% pada saat variabel bebas lainnya tidak berubah (konstan).

Tabel 8. Hasil Uji Parsial (Uji t)

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	-5.664	9.102		-.622	.537
X1	.439	.173	.377	2.534	.015
X2	.705	.281	.373	2.509	.016

Source: Data diolah, 2021

Tabel 8 membandingkan nilai t hitung > t tabel sebesar 2,022 (nilai ini di peroleh dari MsExcel = TINV(5%;39) lalu enter) dan nilai signifikan < 0.05 maka hipotesis Ha diterima. Berdasarkan pertimbangan tabel tersebut diperoleh kesimpulan, yaitu pertama, H1 diterima dengan nilai t hitung 2,534 > t tabel 2,022 serta nilai signifikannya 0,015 < 0.05 sehingga implementasi aplikasi sistem keuangan desa berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah desa. Kedua, H2 diterima dengan nilai t hitung 2,509 > t tabel 2,022 serta nilai signifikannya 0,016 < 0.05 sehingga transparansi berpengaruh positif dan signifikan secara statistik terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah desa.

Tabel 9. Hasil Uji Simultan

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	422.120	2	211.060	16.050	.000b
	Residual	512.856	39	13.150		
	Total	934.976	41			

a. Dependent Variable: Y

b. Predictors: (Constant), X2, X1

Dari hasil analisis regresi dapat diketahui bahwa secara bersama-sama variabel independen berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Hal ini dapat dibuktikan dari nilai f hitung $16,050 > f$ tabel $3,238$ nilai ini diperoleh dari $MsExcel=FINV(5\%;2;39)$ lalu enter) dengan nilai signifikan sebesar $0.000 < 0.05$ maka pada tingkat kepercayaan 95% dapat dikatakan hipotesis kedua diterima yang berarti Implementasi aplikasi sistem keuangan desa dan transparansi berpengaruh positif signifikan secara simultan terhadap Kualitas laporan keuangan pemerintah desa.

Tabel 10. Hasil Uji Determinasi (R^2)

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.672a	.451	.423	3.62631

Berdasarkan nilai R Square dapat dikatakan bahwa sebesar 45,1% variasi kualitas laporan keuangan pemerintah desa yang dijelaskan oleh implementasi aplikasi sistem keuangan desa dan transparansi. Sedangkan variasi kualitas laporan keuangan yang tidak dapat dijelaskan oleh faktor-faktor yang tidak diamati oleh peneliti adalah sebesar 54,9% ($100\% - 45,1\%$), seperti variabel-variabel lain yang belum diteliti dalam penelitian ini.

Pembahasan

Berdasarkan hasil analisis, H1 yang menyatakan bahwa implementasi aplikasi sistem keuangan desa berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah desa. Hal ini berarti dengan meningkatnya implementasi aplikasi sistem keuangan desa maka akan meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah desa. Berkenaan dengan hal tersebut, BPKP, (2016) menyatakan bahwa aplikasi sistem keuangan desa diciptakan meningkatkan kualitas tata kelola keuangan desa. Rahmawati & Fajar, 2017 dalam Puspasari & Purnama, (2018) menambahkan bahwa aplikasi tersebut akan membantu dan memudahkan para perangkat desa dalam membuat pelaporan dan pertanggung jawaban laporan keuangan desa secara cepat dan efisien. Lebih lanjut dijelaskan oleh Rusmayanti, (2014) dalam Puspasari & Purnama, (2018) yang menyatakan bahwa dengan adanya sistem pengelolaan keuangan desa, pemerintah desa menjadi lebih efisien dan efektif dalam pengelolaan keuangan desa serta pendokumentasian menjadi lebih mudah karena jumlah berkas yang efisien serta manfaat data yang bisa digunakan untuk jangka panjang. Dijelaskan lagi oleh kemendagri bahwa aplikasi siskeudes dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengimplementasian berbagai regulasi dibidang pengelolaan keuangan desa yang berdasar pada asas efisiensi, ekonomis, efektif, transparan, akuntabel, dan auditabel.

Menurut tanggapan responden dengan adanya siskeudes, pekerjaan dapat terselesaikan dengan cepat dan tepat. Selain itu, dalam penggunaannya sangat

mudah digunakan, dan masih banyak lagi kelebihan dalam penggunaan aplikasi sikeudes. Hal tersebut sejalan dengan asas-asas dalam mengukur kualitas dari sebuah laporan keuangan. Diantaranya, informasi yang dihasilkan dalam penggunaan aplikasi sikeudes sangat relevan dan dapat diandalkan. Selanjutnya, informasi yang disajikan juga dapat dipahami oleh pengguna laporan keuangan dan dapat di dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Rifandi, (2019) dengan judul "Pengaruh implementasi aplikasi sistem keuangan desa, kompetensi sumber daya manusia, dan transparansi terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah desa" menunjukkan bahwa implementasi aplikasi sistem keuangan desa berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah desa.

Selanjutnya, H2 dinyatakan diterima. Transparansi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah desa. Artinya, dengan meningkatnya transparansi maka dapat meningkatkan pula kualitas laporan keuangan pemerintah desa. Hal tersebut sejalan dengan Peraturan Pemerintah No. 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah yang menyatakan bahwa apabila transparansi dijalankan dengan baik, atau penyusunan laporan keuangan dipertanggungjawaban secara terbuka kepada masyarakat maka akan meningkatkan kualitas laporan keuangan.

Berdasarkan tanggapan responden, informasi dari laporan keuangan pemerintah Desa yang ada di Kecamatan Curia, Kabupaten Enrekang, telah transparan. Hal tersebut dibuktikan dengan adanya pengumuman terkait anggaran dan kemudahan dalam akses laporan keuangan, serta tepat waktu. Hal tersebut sejalan dengan asas-asas untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan yang jujur dan transparan.

Hasil penelitian ini juga sejalan dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Hamsinar, (2017) dengan judul "Pengaruh partisipasi masyarakat, akuntabilitas, dan transparansi kebijakan publik terhadap kualitas laporan keuangan keuangan pemerintah daerah" menunjukkan bahwa transparansi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Sejalan dengan hal tersebut, penelitian yang dilakukan oleh Rifandi, (2019) juga menemukan bahwa transparansi berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah desa.

SIMPULAN

Merujuk pada hasil penelitian dan pembahasan, kesimpulan dari penelitian ini yaitu implementasi aplikasi sistem keuangan desa berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah desa. Artinya, dengan meningkatnya implementasi aplikasi sistem keuangan desa maka akan meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah desa. Selanjutnya, transparansi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah desa. Artinya, dengan meningkatnya transparansi maka dapat meningkatkan pula kualitas laporan keuangan pemerintah desa. Berdasarkan hasil penelitian, kualitas laporan keuangan pemerintah desa Kecamatan Curio masih belum baik. Oleh karena itu, disarankan agar lebih meningkatkan transparansi dan kemampuan dalam mengaplikasikan sistem keuangan desa. selain itu, penelitian ini juga menyarankan

kepada peneliti selanjutnya untuk lebih memperluas rancangan penelitian, mulai dari menambah variabel, jumlah sampel, hingga lokasi penelitian.

Referensi :

- Bappenas. (2016). Penajaman Inpres No. 10 Tahun 2016 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2016 dan Tahun 2017. TRP.
- Boshoff, C., & Arnolds, C. (1995). Some Antecedents of Employee Commitment and Their Influence on Job Performance: A Multi Foci Study. *South African Journal of Business Management* 26.
- BPKP. (2016). Pengawasan Keuangan Desa dengan Aplikasi SISKEUDES. <http://www.bpkp.go.id/sakd/konten/2448/leaflet-simda-desa.bpkp>
- Chin, J. P., Diehl, V. A., & Norman, K. L. (1988). Development of An Instrument Measuring User Satisfaction of The Human-Computer Interface. In *Proceedings of the SIGCHI Conference on Human Factors in Computing Systems*.
- DeLone, W. H., & Lean, E. R. M. (1992). *Information System Success: The Quest for The Dependent Variable (Infomation)*.
- Ermino, R. (2017). Pengaruh Kompetensi SDM, Akuntabilitas, Transparansi, dan Penerapan Sistem Akuntansi terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah (Studi Empiris pada Pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau).
- Flippo, E. B. (1984). *Personnel Management*. McGraw-Hill Companies.
- Hamsinar. (2017). Pengaruh Parsitipasi Masyarakat, Akuntabilitas dan Transparansi Kebijakan Publik Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dengan Sistem Pengendalian Intern. Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
- Harjanti, G. (2019). Pengaruh Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) Terhadap Kualitas Laporan Keuangan dengan Kompetensi Sumber Daya Manusia Sebagai Variabel Pemoderasi. Universitas Widya Dharma.
- Hartono, J. (2007). *Sistem Informasi Keperilakuan*. Andi.
- Ifinedo, P. (2006). Enterprise Systems Success Measurement Model: A Preliminary Study. *Journal of Information Technology Management*, 17(1).
- Mardiasmo. (2018). *Akuntansi Sektor Publik*. Andi.
- Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah. (n.d.).
- Puspasari, O. R., & Purnama, D. (2018). Implementasi Sistem Keuangan Desa dan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Desa di Kabupaten Kuningan. *Jurnal Kajian Akuntansi*, 2(2), 145-159.
- Rifandi, Z. W. (2019). Pengaruh Implementasi Aplikasi Sistem Keuangan Desa, Kompetensi Sumber Daya Manusia, dan Transparansi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Desa (Studi Kasus pada Desa di Kecamatan Wates Kabupaten Kulon Progo). *Jurnal Riset Akuntansi Tirtayasa*, 4(1).
- Seddon, P., & Yip, S.-K. (1992). An Empirical Evaluation of User Information Satisfaction (UIS) Measures for Use with General Ledger Accounting Software. *The Journal Information Systems* 6.
- Susanti. (2018). Pengaruh Sumber Daya Manusia, Sistem Pengendalian Intern, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Pemahaman Tentang PP No 71 Tahun 2010, dan Komitmen Organisasi terhadap Kualitas Laporan Keuangan. Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa.